

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN  
MENGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI BATAM )**

Hendi  
NPM : 1451071

**ABSTRAK**

Penulis melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam )** penelitian ini memiliki latar belakang terkait kebutuhan kredit yang tidak hanya dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam menunjang usahanya namun juga bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya bergantung pada gaji bulanan tidak jarang memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhannya melalui pinjaman kredit. Berbeda dengan kredit yang diberikan pada masyarakat atau para pelaku usaha pada umumnya, kredit yang diberikan bank kepada para PNS/ASN dapat diberikan dengan hanya meminta jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). SK PNS merupakan surat keputusan yang diberikan kepada seorang ASN/PNS

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni penulis melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat dan jenis data yang digunakan adalah Data Primer sebagai data utama dan Data Sekunder sebagai data pendukung. Data Primer yang digunakan penulis adalah wawancara dan observasi di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan SK memiliki kelemahan apabila terjadi wan prestasi dan resiko kredit macet karena ketiadaan jaminan tambahan (*collateral*) sehingga perlu dilakukan optimalisasi prosedural maupun pengawasan terhadap proses pelaksanaan jaminan dengan SK PNS untuk memperkecil resiko. Selain itu perlu dilakukan penerapan Standar Operating Procedure (SOP) secara lebih efektif, persyaratan administrasi yang lebih ketat sebagai dasar pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit.

Kata Kunci: ***Perjanjian Kredit, Jaminan, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil***